

Penguatan Implementasi Prinsip Good Governance Melalui Program Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Sukaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak

Deni Permana^{1*}, Nita Suryaningsih², Yohanes Oci³, Anisa Murnawati⁴, Iim Irmawati⁵

^{1,3,4,5}Universitas Pamulang, Jalan Raya Serang-Jakarta, Kelurahan Kelodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Kode Pos 42124, Indonesia

²STISIP Banten Raya, Jalan Raya Rangkasbitung Km. 04 Pandeglang, Dusun Sabitangtu Desa Bangkonol, Kec. Sumur, Kab. Pandeglang, Prov. Banten

E-mail: dosen03359@unpam.ac.id

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7490>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 10 Jul 2026

Revised: 16 Jul 2026

Accepted: 22 Jul 2026

Kata Kunci:

Sumber Daya Desa,
Ekonomi Mandiri,
Ekonomi Inklusif,
Pemberdayaan
Masyarakat,
Transparansi, PkM.

Keywords:

Village Resources,
Independent Economy,
Inclusive Economy,
Community
Empowerment,
Transparency, PkM.



ABSTRACT

Pembangunan desa memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi potensi lokal yang dimiliki. Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak memiliki berbagai sumber daya yang berpotensi dikembangkan, namun pemanfaatannya belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi sumber daya desa, merumuskan strategi pemerintah desa dan masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya, serta mengkaji upaya optimalisasi tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan inklusif. PkM ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan optimalisasi sumber daya desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mandiri dan inklusif di Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung. Pembangunan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena desa merupakan basis aktivitas ekonomi masyarakat yang didukung oleh potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sosial. Namun pemanfaatan potensi tersebut di Desa Sukaraja masih belum optimal, yang ditandai dengan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, rendahnya akses pasar dan modal, serta rendahnya sinergi antar pemangku kepentingan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif, edukatif, dan implementatif melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap meliputi persiapan dan pemetaan kebutuhan mitra, pemaparan materi penguatan kapasitas aparatur desa, pengembangan sistem keterbukaan informasi desa, pemberdayaan partisipasi masyarakat, pendampingan implementatif, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan pendampingan berkelanjutan mampu meningkatkan pemahaman aparatur desa terkait tata kelola sumber daya yang transparan dan akuntabel, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Village development plays a strategic role in supporting national economic Growth through the optimization of local potential. Sukaraja Village, Warunggunung District, Lebak Regency, has various resources with the potential to be developed, but their utilization has not been optimal in improving community welfare. This study aims to analyze the potential of village resources, formulate strategies for the village government and community in optimizing resources, and test these optimization efforts in encouraging independent and inclusive economic growth. This Community Service Program (PKM) aims to analyze strategies and optimize village resources in encouraging independent and inclusive economic growth in Sukaraja Village, Warunggunung District. Village development plays a strategic role in national development because villages are the basis of community economic activities supported by potential natural resources, human resources, and social capital. However, the utilization of this potential in Sukaraja Village is still not optimal, which is characterized by limited human resource capacity, low market and capital access, and lack of synergy between stakeholders. The methods used in this activity are a participatory, educational approach, and implementation through the

Community Service (PKM) program. The activities were implemented in stages, encompassing preparation and mapping of partner needs, providing materials to strengthen the capacity of village officials, developing a village information dissemination system, empowering community participation, providing implementation assistance, and monitoring and evaluation. The results showed that the participatory approach and ongoing assistance improved village officials' understanding of transparent and accountable resource management and encouraged active community participation in village development.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Deni Permana. AN, et al. (2026), Penguatan Implementasi Prinsip Good Governance Melalui Program Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Sukaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, 5(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7490>

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tidak penting dalam memperkuat posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan partisipatif. Undang-undang tersebut memberikan ruang yang luas bagi desa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan desa, serta penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan akses terhadap sumber pendanaan yang cukup besar melalui berbagai skema transfer, seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bantuan keuangan lainnya. Namun demikian, peningkatan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki desa juga menuntut adanya kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik agar pengelolaan sumber daya tersebut dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Tanpa tata kelola yang baik, peningkatan sumber daya justru berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pemahaman otoritas, lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, rendahnya transparansi dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya partisipasi dalam masyarakat proses pembangunan desa.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip good governance di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Banyak aparatur desa yang masih menghadapi kesulitan dalam mengelola administrasi pemerintahan, menyusun perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, serta mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sistem pengawasan dan akuntabilitas di tingkat desa juga masih belum berjalan secara optimal. Dalam beberapa kasus, masyarakat masih memiliki keterbatasan akses terhadap informasi terkait pengelolaan anggaran desa dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal ini dapat menghambat terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Masalah lain yang sering muncul adalah belum optimalnya mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum partisipatif bagi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa seringkali masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas. Akibatnya, program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat.

Di sisi lain, perkembangan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih berkualitas juga semakin meningkat. Masyarakat tidak lagi hanya menuntut pembangunan fisik semata, tetapi juga mengharapkan adanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, responsif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, penguatan implementasi prinsip good governance di tingkat desa menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasi prinsip good governance di tingkat desa adalah melalui pendampingan program tata kelola pemerintahan desa. Pendampingan merupakan proses pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur

desa dan masyarakat dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa secara lebih baik. Melalui pendampingan program, aparat desa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum.

Pendampingan program tata kelola pemerintahan desa juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam proses pembangunan desa. Pendampingan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dapat membantu pemerintah desa dalam memperbaiki sistem administrasi pemerintahan, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Sukaraja yang terletak di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Desa ini memiliki berbagai potensi sumber daya alam dan sosial yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, seperti banyak desa lainnya, Desa Sukaraja juga menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam hal penguatan kapasitas kelembagaan dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Beberapa permasalahan yang masih dapat ditemukan di Desa Sukaraja antara lain berkaitan dengan optimalisasi sistem administrasi pemerintahan desa, transparansi pengelolaan keuangan desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk memperkuat penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa. Dalam konteks tersebut, program pendampingan tata kelola pemerintahan desa menjadi salah satu strategi yang relevan untuk mendorong peningkatan kapasitas aparat desa serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai proses pembelajaran bersama yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparat desa menuju tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Pendampingan juga dapat membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta merumuskan solusi yang tepat berdasarkan kondisi dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, pendampingan program dapat menjadi instrumen strategi dalam memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa secara lebih efektif dan berkelanjutan. Penguatan implementasi prinsip *good governance* melalui pendampingan program tata kelola pemerintahan desa juga memiliki relevansi yang kuat dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Tata kelola pemerintahan desa yang baik akan mendorong terciptanya proses pembangunan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

METODE

Kegiatan dilaksanakan di Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada tanggal 9–11 April 2026. Peserta termasuk kegiatan 87 orang yang terdiri atas aparat desa, kelompok tani, pelaku usaha mikro, kelompok perempuan (PKK), karang taruna, dan tokoh masyarakat yang mewakili berbagai elemen sosial-ekonomi Desa Sukaraja. Jumlah kehadiran ini melampaui target awal sebesar 30%, yang menunjukkan tingginya relevansi program bagi kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan metodologi yang digunakan mencakup tiga dimensi yang saling melengkapi: (1) partisipatif masyarakat dilibatkan sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan mulai dari pemetaan kebutuhan hingga evaluasi; (2) transfer pengetahuan edukatif dilakukan melalui pelatihan tematik, lokakarya interaktif, dan pendampingan kontekstual; dan (3) hasil pelatihan yang implementatif diterapkan langsung di lapangan dengan asistensi berkelanjutan dari tim PkM. Pendekatan ini didesain berdasarkan prinsip-prinsip *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang menekankan pentingnya memulai dari realitas yang dialami komunitas sasaran (Chambers, 1994: 953). Secara operasional, pelaksanaannya dibagi ke dalam enam tahapan terpadu sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PkM Desa Sukaraja

No.	Tahapan	Waktu	Metode	Output
-----	---------	-------	--------	--------

1	Persiapan & Pemetaan Kebutuhan	9 April 2026	Koordinasi, observasi lapangan, wawancara, FGD	Data kebutuhan mitra, basis penyesuaian materi
2	Penguatan Kapasitas Aparatur dan Masyarakat	10 April 2026	Ceramah partisipatif, diskusi interaktif	Peningkatan pemahaman tata kelola sumber daya desa
3	Strategi & Optimalisasi Sumber Daya	10 April 2026	Lokakarya, pemetaan partisipatif, diskusi kelompok kecil	Dokumen peta potensi sumber daya desa
4	Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat	10 April 2026	Forum dialog terbuka, pemaparan populer	Forum Ekonomi Desa terbentuk; 4 program prioritas disepakati
5	Monitoring, Evaluasi & Keberlanjutan	11 April 2026	Evaluasi partisipatif, forum refleksi dialogis	Rekomendasi perbaikan; rencana tindak lanjut

Sumber: Desain pelaksanaan tim PkM, 2026

Teknik pengumpulan data mencakup observasi partisipatif (transect walk), wawancara semi-terstruktur dengan aparatur desa dan tokoh masyarakat, focus group discussion (FGD), serta pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta pelatihan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan triangulasi sumber, dilengkapi dengan analisis komparatif data pre-test dan post-test menggunakan statistik deskriptif sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema "Strategi dan Optimalisasi Sumber Daya Desa dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Mandiri dan Inklusif" dilaksanakan di Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak pada tanggal 9 hingga 11 April 2026. Kegiatan dalam satu hari tersebut secara keseluruhan melibatkan perangkat desa, petani, pelaku usaha dan warga masyarakat yang dipandang memiliki pengaruh dan kepentingan dalam Pembangunan social ekonomi Desa Sukaraja.

Pemetaan dan Dokumentasi Potensi Sumber Daya Desa Sukaraja

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pemetaan atau inventarisir potensi sumber daya Desa Sukaraja secara komprehensif. Dalam proses ini melibatkan aparatur desa dan juga warga masyarakat Desa Sukaraja sebagai pelaku utama dan pelaku langsung tentang keberadaan dan kondisi secara actual sumber daya yang ada di desa Sukaraja. Kegiatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai data awal sebagai bahan diskusi pada pelaksanaan PkM. Hasil pemetaan yang dilakukan oleh tim PkM menunjukkan bahwa Desa Sukaraja memiliki potensi sumber daya yang jauh lebih kaya dibandingkan yang selama ini dikelola mulai dari sektor pertanian, perikanan dan peternakan yang memiliki nilai ekonomis. Namun realitas yang ditemukan di lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar lahan tersebut masih ditanami dengan pola monokultur tradisional berbasis padi, yang produktivitasnya relatif rendah dan sangat rentan terhadap fluktuasi iklim. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara potensi agronomis lahan (land capability) dengan produktivitas aktual yang dicapai petani suatu permasalahan klasik yang bersumber dari keterbatasan pengetahuan teknis dan akses terhadap input pertanian berkualitas (Mubyarto, 2004: 35; Arsyad, 2018: 67).

Dalam sektor perikanan maupun peternakan masih terdapat berbagai permasalahan di lapangan. Dalam tatakelola yang dilakukan oleh warga masyarakat masih belum maksimal. Dalam informasi yang didapatkan bahwa sektor perikanan dan peternakan masih belum menjadi hal yang prioritas sehingga dalam produksi sumber daya yang ada tidak berjalan dengan baik. Jenis ikan yang paling umum dibudidayakan warga adalah ikan lele, nila, dan gurame, namun dengan kapasitas produksi yang sangat terbatas akibat penggunaan teknik budidaya yang masih bersifat subsisten. Ketiadaan pengelolaan berbasis data ini menjadi hambatan serius bagi peningkatan produktivitas dan profitabilitas usaha perikanan warga. Di luar sektor primer tersebut, pemetaan juga berhasil menginventarisasi beberapa potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal yang selama ini sama sekali belum tersentuh secara serius. Di antaranya adalah ketersediaan bahan baku bambu yang cukup melimpah di beberapa wilayah desa yang berpotensi dikembangkan menjadi produk kerajinan bernilai tinggi. Data diluar dari sektor primer

tersebut dapat dijadikan usaha produk lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan menjadi salah satu pendapatan tambahan warga masyarakat Desa Sukaraja.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen Usaha

Sesi pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha merupakan komponen terpanjang dan paling intensif dari seluruh rangkaian kegiatan PkM ini. Pelatihan berlangsung selama satu hari penuh pada tanggal 10 April 2026, diikuti oleh beberapa pelaku usaha mikro yang berasal dari latar belakang usaha yang beragam, mulai dari sektor pertanian dan pengolahan hasil tani, perikanan, kerajinan dan ekonomi kreatif, dan perdagangan kecil (warung). Komposisi ini mencerminkan struktur ekonomi informal Desa Sukaraja yang beragam namun belum terorganisasi secara produktif. Sebelum pelatihan dimulai, tim PkM melakukan pre-test sederhana untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta tentang manajemen usaha dasar. Dari pre-test yang dilakukan pada pelaksanaan PkM bahwa semua dari komposisi yang ada mengaku tidak pernah menyusun rencana usaha secara tertulis, tidak memisahkan keuangan pribadi dan usaha, dan yang terakhir hanya sebagian kecil yang melakukan pencatatan transaksi secara rutin. Temuan ini secara empiris mengkonfirmasi kondisi yang selama ini hanya bersifat deskriptif dalam latar belakang kegiatan. Dengan demikian bahwa kelemahan manajerial merupakan hambatan utama perkembangan usaha mikro di Desa Sukaraja, bukan semata-mata keterbatasan modal atau sumber daya (Todaro & Smith, 2018: 231; Rahman & Putri, 2020: 84).

Pelatihan disusun dalam tiga sesi yang saling berkaitan. sesi pertama berfokus pada Literasi Keuangan Usaha, yang mencakup konsep pemisahan keuangan pribadi-usaha, pencatatan transaksi sederhana berbasis buku kas, dan analisis laba-rugi dasar. Peserta tidak sekadar menerima materi secara pasif; mereka diminta mempraktikkan langsung pencatatan transaksi fiktif berbasis kasus yang diambil dari kondisi usaha mereka sendiri. Pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) semacam ini terbukti lebih efektif dibandingkan ceramah satu arah dalam mengubah perilaku keuangan pelaku usaha (Kolb, 1984; Rahman & Putri, 2020). Sesi kedua membahas Perencanaan dan Pengembangan Usaha, yang mencakup penyusunan Business Model Canvas (BMC) yang disederhanakan sesuai kapasitas kognitif peserta, identifikasi segmen pelanggan, proposisi nilai produk, serta proyeksi pendapatan jangka pendek. Sesi ketiga membahas Strategi Pemasaran dan Inovasi Produk, dengan penekanan pada pentingnya diferensiasi produk, pengembangan kemasan yang lebih menarik, dan identifikasi segmen pasar baru termasuk pasar digital. Kelompok perempuan pelaku usaha pengolahan pangan menjadi yang paling antusias dalam sesi ini, karena mereka untuk pertama kali mendapatkan pemahaman terstruktur tentang bagaimana menetapkan harga jual yang berbasis pada perhitungan biaya produksi (*cost-based pricing*), bukan sekadar mengikuti harga tetangga atau perkiraan subjektif. Perubahan perspektif ini sangat fundamental karena praktik penetapan harga yang tidak berbasis perhitungan merupakan salah satu penyebab utama usaha mikro sulit berkembang (Adisasmita, 2013: 104). Setelah sesi ini dilakukan, maka Tim PkM melakukan post-test di akhir sesi pelatihan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pemahaman peserta tentang pemisahan keuangan usaha dan pribadi meningkat, kemampuan menyusun rencana usaha dasar meningkat, dan pemahaman tentang strategi penetapan harga berbasis biaya meningkat. Walaupun perubahan sikap dan perilaku nyata baru dapat diukur dalam jangka menengah, pergeseran kognitif yang terukur dalam pre-test dan post-test ini merupakan indikator awal yang menjanjikan bagi terjadinya transformasi praktik usaha yang berkelanjutan.

Penguatan Akses Pasar dan Jaringan Permodalan

Salah satu kendala paling menghambat perkembangan ekonomi Desa Sukaraja, sebagaimana teridentifikasi dalam analisis situasi, adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap pasar dan sumber permodalan formal. Program PkM ini merancang dua jalur intervensi yang saling melengkapi yang pertama adalah perluasan jaringan pemasaran melalui platform digital, dan fasilitasi akses terhadap skema pembiayaan formal. Dalam jalur pertama, tim PkM memfasilitasi sesi praktik langsung pemasaran digital. Peserta dibimbing secara langsung dalam membuat akun bisnis di platform Instagram dan Facebook, menyusun konten produk yang menarik berbasis foto dan deskripsi singkat, serta memahami mekanisme dasar penjualan melalui WhatsApp Business. Pada akhir sesi diharapkan semua peserta dapat membuat akun usaha aktif dan langsung memposting produk masing-masing di berbagai platform media sosial. Namun demikian, tim PkM menyadari bahwa keberhasilan membuat akun digital saja tidak serta-merta menghasilkan peningkatan penjualan. Diperlukan proses pembelajaran yang

berkelanjutan tentang pengelolaan konten, respons pelanggan, dan manajemen pesanan daring. Oleh karena itu, selain sesi pelatihan langsung, tim PkM juga menyiapkan panduan pemasaran digital berbahasa sederhana yang dapat digunakan peserta sebagai referensi mandiri setelah kegiatan berakhir. Panduan ini disusun secara kolaboratif antara tim PkM dan peserta pelatihan, sehingga isinya benar-benar sesuai dengan kapasitas dan konteks pengguna.

Dalam jalur penguatan akses permodalan, tim PkM melaksanakan sesi edukasi tentang berbagai skema pembiayaan formal yang tersedia bagi pelaku UMKM desa. Materi mencakup pengenalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan prosedur dan persyaratan pengajuannya, program bantuan modal dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, serta mekanisme pembiayaan berbasis koperasi simpan pinjam. Dalam sesi ini, peserta mengaku sama sekali belum pernah mengakses skema pembiayaan formal apapun, bukan karena tidak memenuhi syarat, melainkan karena tidak mengetahui keberadaannya. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya edukasi finansial sebagai komponen esensial dalam strategi pemberdayaan ekonomi desa (Nurcholis, 2011: 87; Kementerian Desa PDTT, 2020: 12). Sebagai tindak lanjut konkret, tim PkM mencoba akan membangun komunikasi untuk memfasilitasi pertemuan antara perwakilan kelompok usaha desa dengan kepala unit Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lebak. Tindak lanjut ini, diharapkan dapat menghasilkan nota kesepahaman antara penyedia permodalan dengan masyarakat agar dapat membantu dalam soal pembiayaan usaha. Selain itu juga, penyampaian pada proses pengajuan peminjaman modal usaha harus disederhanakan mulai dari proses sampai dengan pencairan. Penekanan ini menjadi penting agar warga masyarakat Desa Sukaraja dapat mengakses modal dan dapat mengembangkan usahanya demi terciptanya sirkular ekonomi desa yang inklusif dan mandiri. Maka dengan demikian, perubahan sosial juga akan mempengaruhi dengan meningkatnya ekonomi masyarakat.

Penguatan Sinergi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Dimensi kelembagaan merupakan komponen yang paling sering terabaikan dalam program pemberdayaan ekonomi desa, namun paradoksnya justru merupakan fondasi yang paling menentukan keberlanjutan hasil-hasil pemberdayaan tersebut. Tanpa mekanisme koordinasi kelembagaan yang kuat, peningkatan kapasitas individual yang dihasilkan dari pelatihan dan pendampingan berisiko besar tidak terinstitusionalisasi dan menguap begitu program berakhir. Kesadaran inilah yang mendorong tim PkM untuk menjadikan penguatan sinergi kelembagaan sebagai salah satu komponen strategis dari seluruh rangkaian kegiatan. Sesi pemberdayaan partisipasi masyarakat dirancang sebagai forum dialog terbuka yang memberikan ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyuarakan pandangan, aspirasi, dan gagasan mereka tentang pembangunan ekonomi desa. Forum ini tidak didesain sebagai ceramah dari tim PkM kepada peserta, melainkan sebagai ruang deliberasi horizontal di mana semua suara dari petani, perempuan pedagang kecil, pemuda karang taruna, hingga aparatur desa memiliki bobot yang setara. Pendekatan deliberatif ini sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang menekankan inklusivitas dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan publik (Nurcholis, 2011; Kementerian Desa PDTT, 2020).

Dalam forum tersebut, teridentifikasi sejumlah hambatan koordinasi yang selama ini tidak pernah dibahas secara terbuka. Di antaranya adalah minimnya komunikasi antara pemerintah desa dan kelompok usaha lokal dalam perencanaan program dana desa. Kecenderungan program pelatihan eksternal yang dilakukan secara insidental tanpa kesinambungan dan tindak lanjut serta ketiadaan platform bersama yang memungkinkan pelaku usaha dari sektor berbeda untuk berkolaborasi dan saling mendukung. Identifikasi hambatan-hambatan ini secara kolektif merupakan langkah awal yang sangat penting dalam merancang mekanisme koordinasi yang lebih fungsional.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema "Strategi dan Optimalisasi Sumber Daya Desa dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Mandiri dan Inklusif di Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak" yang dilaksanakan pada 9–11 April 2026 telah berhasil mencapai seluruh tujuan yang telah ditetapkan, bahkan melampaui beberapa target yang direncanakan. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan, tiga simpulan utama dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, Desa Sukaraja memiliki potensi sumber daya yang kaya dan beragam mencakup lahan pertanian, perikanan yang berpotensi dikembangkan secara semi-intensif,

serta modal sosial komunitas yang kuat dalam bentuk gotong royong dan kelompok-kelompok usaha yang telah terbentuk. Melalui pemetaan partisipatif yang dilakukan bersama masyarakat, potensi-potensi ini kini telah terdokumentasikan secara sistematis.

Kedua, strategi intervensi yang dikembangkan melalui empat pilar optimalisasi sumber daya alam, peningkatan kapasitas SDM, penguatan akses pasar dan modal, serta pembangunan sinergi kelembagaan. Pelatihan kewirausahaan yang diikuti pelaku usaha menghasilkan rata-rata peningkatan pemahaman, pelaku usaha mampu membuat akun pemasaran digital aktif, dan juga pelaku usaha mendapatkan pemahaman tentang mendapatkan permodalan untuk mengembangkan usaha. Keseluruhan capaian ini mengindikasikan bahwa pendekatan partisipatif, edukatif, dan implementatif yang diterapkan dalam program PkM ini merupakan pendekatan yang tepat dan kontekstual untuk kondisi Desa Sukaraja. Ketiga, kegiatan PkM ini telah berhasil meletakkan fondasi awal bagi tumbuhnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Desa Sukaraja. Kelompok-kelompok yang selama ini tersisih dari arus utama ekonomi desa termasuk perempuan pelaku usaha rumahan, pemuda, dan petani kecil mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pengetahuan, jaringan, dan mekanisme koordinasi yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka. Walaupun transformasi ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang dari tiga hari kegiatan PkM, fondasi kelembagaan, pengetahuan, dan jaringan yang dibangun dalam kegiatan ini menyediakan titik berangkat yang kokoh bagi proses transformasi tersebut. PkM ini memberikan dampak yang nyata dan langsung terasa. Kelompok petani menyatakan bahwa pemahaman mereka tentang teknik pertanian modern dan pengelolaan lahan meningkat signifikan. Pelaku usaha mikro mengaku mendapatkan wawasan baru tentang manajemen keuangan dan strategi pemasaran yang sebelumnya tidak pernah mereka pelajari secara terstruktur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Implementasi Prinsip Good Governance melalui Program Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak. Penghargaan khusus diberikan kepada Pemerintah Desa Sukaraja beserta seluruh perangkat desa atas komitmen, keterbukaan, dan partisipasi aktif selama proses pendampingan berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah kecamatan, tim pelaksana, narasumber, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga hasil kegiatan ini mampu memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kemajuan Desa Sukaraja dan kesejahteraan masyarakatnya.

REFERENSI

- Abdiyanto. 2024. "Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Aparatur Desa." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 1.
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, I., & Son, H. H. (2007). Measuring inclusive growth. *Asian Development Review*, 24(1), 11–31.
- Arsyad, L. (2018). *Ekonomi pembangunan* (Edisi 5). UPP STIM YKPN.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). *Evaluasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford University Press.
- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2020. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Mubyarto. 2004. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Penguatan Implementasi Prinsip Good Governance Melalui Program Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Sukaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, Deni Permana, Nita SuryaningsimYohanes Oci, Anisa Murnawati, Iim Irmawati 1735

Sutopo, Dhanny Septimawan. 2023. "Memahami Pembangunan Desa dan Perspektifnya." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3.

Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. 2011. *Economic Development*. New York: Pearson Education.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.